

ABSTRAK

UPAYA HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN KARO MEMPERTAHANKAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA TANAH KARO

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan harus dilindungi. Salah satunya ialah kekayaan sumber daya alam Sumatera Utara yang melimpah, setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing untuk itu tiap daerah harus memiliki pengakuan atas sumber daya alam tersebut untuk menghindari klaim dari pihak yang tidak diinginkan. Indikasi Geografis adalah sertifikasi yang dilindungi Undang-Undang atas produk dengan ciri yang khas dan hanya dihasilkan di wilayah geografis tertentu. Sertifikat Indikasi Geografis didapatkan dengan memenuhi syarat yaitu membuat uraian produk yang diajukan.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu terkait tentang apakah keuntungan dan kerugian setelah terdaftarnya Kopi Arabika Tanah Karo ke dalam Indikasi Geografis dan bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten mempertahankan Indikasi Geografis Kopi Arabika Tanah Karo.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan penelitian hukum, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data studi lapangan yaitu berupa wawancara dan studi kepustakaan yang menggunakan teori perlindungan hukum dan teori sistem hukum. Analisis data penelitian ini menggunakan kualitatif dan dari hasil analisis data yang telah terkumpul ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa produk Kopi Arabika Tanah Karo setelah didaftarkan ke Indikasi Geografis tentu mempunyai nilai positif dan negatif bagi pemegang Indikasi Geografis. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karo mempertahankan Indikasi Geografis Kopi Arabika Tanah Karo adalah melakukan kegiatan untuk melindungi Indikasi Geografis seperti melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis kepada masyarakat Kabupaten Karo. Sedangkan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Medan memberikan pelayanan, perlindungan kepada pemilik Kekayaan Intelektual, Melakukan sosialisasi ke semua pihak agar potensi-potensi Indikasi Geografis yang ada di Sumatera Utara diberikan perlindungan dengan cara di daftarkan, dan yang terakhir mendampingi proses-proses bagaimana akan syarat dan ketentuan untuk dipenuhi.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Indikasi Geografis

ABSTRACT

LEGAL EFFORTS OF THE KARO DISTRICT GOVERNMENT TO MAINTAIN GEOGRAPHIC INDICATIONS OF TANAH KARO ARABIC COFFEE

Indonesia has the potential of abundant natural resources and must be protected. One of them is North Sumatra's abundant natural resource wealth, which needs to be used as well as possible and preserved to maintain the balance of nature. Each region has its own characteristics, therefore each region must have the recognition of these natural resources to avoid claims from unwanted parties. Geographical Indication is a certification protected by law for a product with unique characteristics and only produced in a certain geographic area. Geographical Indication Certificate is obtained by fulfilling the requirements, namely making a description of the product being submitted. Currently the Tanah Karo Arabica Coffee Protection Society (MPIG-KATK) has registered their products with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic to obtain a Geographical Indication Certificate.

The problems discussed in this study are related to what are the advantages and disadvantages after registering Tanah Karo Arabica Coffee into a Geographical Indication? And how are the efforts of the Regency Government to maintain the Geographical Indication of Ground Arabica Coffee?

This study uses an empirical juridical approach, with analytical descriptive specifications. Sources and types of data used in this study use primary data in the form of interviews and secondary data, namely primary legal materials in the form of Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks and Government Regulation Number 51 of 2007 concerning Geographical Indications, secondary legal materials in the form of books, journals and legal research, as well as tertiary legal materials. Field study data collection techniques are in the form of interviews and literature studies using legal protection theory and legal system theory. This research data analysis uses qualitative and from the results of the analysis of the data that has been collected, conclusions are drawn using the inductive method and presented in the form of legal writing.

Keywords: Authority, Notary.